

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai memiliki pemikiran/ideologi, visi misi dan tujuan yang sama tentang politik partainya sehingga dapat mempromosikan tujuan ideologis partainya dalam kebijakan yang akan dilaksanakan. Partai politik adalah bagian utama dalam demokrasi, peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berdemokrasi suatu negara merupakan hal yang penting. Oleh karena itu partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>1</sup>

Secara umum partai politik memiliki 6 fungsi utama dalam keberlangsungan partainya, yaitu sarana rekrutmen politik, sarana sosialisasi politik, sarana komunitas politik, sarana pengatur konflik, sarana kontrol politik, dan sarana partisipasi politik.<sup>2</sup> Salah satu fungsi yang patut untuk menjadi sorotan adalah sarana rekrutmen partai politik. Rekrutmen partai politik adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang ditujukan untuk meneruskan kepemimpinan di dalam partai untuk masa yang akan datang. Partai politik memperluas perannya dalam membuka peluang selebar-lebarnya

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hal. 135

<sup>2</sup> *Ibid.*

untuk warga negara menjadi bagian dan kader partai politik untuk turut serta berpartisipasi politik di suatu negara. Dengan demikian partai politik tidak pernah kekurangan kader-kader yang berkualitas dan sesuai dengan standar nilai partai.

Berdasarkan fungsi partai politik, fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi yang sangat penting bagi partai politik karena sebagai penentu kemenangan bagi sebuah partai politik dalam kontestasi politik. Susan Scarrow di bukunya berjudul *Political Parties Democracy* menjelaskan partai politik merupakan anak dari demokrasi, partai politik memiliki tugas untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, menggambarkan dan menawarkan alternatif kebijakan dan menyediakan pilihan partai politik kepada masyarakat dan pemilihan umum (Pemilu).<sup>3</sup> Gabriel Almond menjelaskan bahwa proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.<sup>4</sup> Tujuan dari dilakukannya rekrutmen politik untuk sirkulasi jabatan politik dengan melibatkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

Bedasarkan hal tersebut, tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 1 telah menjelaskan bahwa “Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a) Anggota partai politik

<sup>3</sup> Diah Angraini, Rekrutmen Kandidat Perempuan Oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017), (*Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*), 2019.

<sup>4</sup> Muhadam & Teguh Ilham Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

- b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c) Bakal calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
- d) Bakal calon Presiden Dan Wakil Presiden.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Rekrutmen politik secara demokrasi dimaksudkan adalah setiap mekanisme rekrutmen partai harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yaitu kesamaan, keadilan, kebebasan, kedaulatan mayoritas, serta makna keterbukaan atau transparan dalam rekrutmen partai politik bermakna bahwa partai politik membuka secara umum dalam rekrutmen tersebut dan menerima semua golongan atau kelompok untuk bergabung menjadi kader partai dan mendapatkan pembinaan kaderisasi secara internal dari partai.

Bagi partai politik proses rekrutmen akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan suatu organisasi. Modal awal kemajuan organisasi terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas diartikan terdidik sesuai dengan tugas atau kewajiban, atau mempunyai pengalaman praktek atau fungsional. Serta dengan rekrutmen tersebut maka akan diseleksi kesesuaian antara karakter kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politik. Sehingga

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Tentang Partai Politik (Indonesia, 2011).

<sup>6</sup> *Ibid.*

akhirnya ideologi partai politiklah yang menentukan seorang kandidat diterima atau tidak sebagai anggota partai politik.<sup>7</sup>

Rekrutmen politik sendiri terjadi di seluruh partai politik, baik partai politik yang sudah lama berdiri maupun partai politik yang baru terbentuk. Salah satunya yaitu Partai Solidaritas Indonesia<sup>8</sup>. PSI gencar melakukan rekrutmen untuk meningkatkan kualitas partai itu sendiri maupun untuk menarik suara yang ada dimasyarakat. PSI sebagai partai baru bisa mengusung banyak calon anggota legislatif mereka pada pemilihan legislatif<sup>9</sup> perdananya di Kota Padang tahun 2019. PSI mengusung 45 calon anggota legislatif dari 5 daerah pilihan yang ada di Kota Padang. Walaupun mendapatkan hasil yang terbilang buruk, PSI tetap layak di apresiasi untuk pileg pertamanya. Berdasarkan data dari KPU, pada pileg tahun 2019, PSI menjadi partai yang memperoleh suara paling rendah dengan hanya mendapatkan suara 5.380 atau sekitar 1.2% dari total seluruh suara pada pileg DPRD Kota Padang tahun 2019.<sup>10</sup> Berbeda dengan tahun 2024, berdasarkan data yang diterima KPU, PSI hanya mengusung 6 calon dari 6 daerah pilihan di Kota Padang untuk mengikuti pileg tahun 2024.<sup>11</sup> Hal tersebut tentu menjadi sebuah penurunan yang signifikan dari pileg sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa PSI hanya mengirim 6 calon mereka untuk pileg Kota Padang tahun 2024. Diketahui bahwa Kota Padang sendiri merupakan Kab/Kota yang paling banyak memiliki hasil suara yang diverifikasi pada pileg

<sup>7</sup> Analius Giawa and Tri Daya Rini, 'Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy)', *JBTI : Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8.2 (2017), 161–68

<sup>8</sup> Selanjutnya akan disingkat "PSI"

<sup>9</sup> Selanjutnya akan disingkat "pileg"

<sup>10</sup> KPU, "Hasil Hitung Suara Pemilihan Legislatif", 2019

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/> Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>11</sup> KPU, "Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota", *Kominfo*, 2023

[https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct\\_dprd](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd) Diakses 12 November 2023.

tahun 2019 yaitu 448.636 suara namun PSI hanya mengirim 6 orang calon mereka, apakah perbedaan rekrutmen politik dari PSI ketika pileg 2019 yang berhasil mengusung 45 calon dan 2024 yang hanya mengusung 6 calon.

Sejalan dengan hal tersebut, jika melihat penelitian-penelitian sebelumnya dan setelah melakukan literatur review terhadap jurnal-jurnal penelitian yang sama dengan tema yang diteliti yaitu dari penelitian Zulfadli Rahmad Siregar dengan judul Partai Politik dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap pemuda)<sup>12</sup> yang menjelaskan proses rekrutmen PKS untuk menjaring kader-kader yang berkualitas dan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kader-kader muda.

Selanjutnya dari penelitian Masni Bangu, Mohamad Saleh Refra, Rislen Alvionita, Salma Wati dan Uswatul Mardiyah dengan judul Pola Rekrutmen Partai Demokrat Dalam menentukan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong<sup>13</sup> dengan fokus penelitian untuk mengetahui pola rekrutmen kader dan kriteria penentuan calon anggota legislatif Partai Demokrat dan juga ingin mengetahui secara umum pola Partai Demokrat dalam merekrut kader untuk menjadi calon anggota legislatif partai tersebut di Kota Sorong. Kemudian penelitian dari Heby Hara Octabrian dengan judul Rekrutmen bakal calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia DPW Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2019<sup>14</sup> yang fokus penelitiannya yaitu ingin melihat proses

---

<sup>12</sup> Zulfadli Rahman Siregar, *'Partai Politik Dan Rekrutmen ( Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemuda )*, 2020.

<sup>13</sup> Salma Wati dan Uswatul Mardiyah Masni bangu, Mohamad Saleh Refra, Rislen Alvionita, *"Pola Rekrutmen Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 Di Kota Sorong"*, 2023.

<sup>14</sup> Heby Hara Octabrian, *"Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Dpw Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019"*, 2021.

rekrutmen calon anggota legislatif PSI melalui DPW Sumatera Barat yang didasari oleh PSI yang tergolong partai baru bisa mendapatkan kuota Bacaleg sebesar 100%.

Setelah melakukan *literature review* terhadap jurnal diatas, penelitian terdahulu lebih membahas bagaimana pola atau *step by step* dari rekrutmen yang di terapkan pada sebuah partai politik. Namun pada penelitian ini peneliti ingin melihat secara lebih mendalam terkait rekrutmen yang diterapkan oleh PSI dalam merekrut kader untuk diusung menjadi calon anggota legislatif yang mana PSI hanya mendapat 6 calon yang diusung untuk pileg DPRD Kota Padang tahun 2024. Seterusnya belum ada penelitian yang meneliti rekrutmen politik PSI Kota Padang. Maka hal tersebut peneliti hadirkan untuk menjadi *Novelty* (kebaruan) atau yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu. Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait rekrutmen politik calon anggota legislatif PSI pada pileg DPRD Kota Padang tahun 2024.

## 1.2. Rumusan Masalah

PSI merupakan partai yang baru dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai ini resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca pemilihan presiden tahun 2014.<sup>15</sup> PSI mengemukakan pada website resmi mereka bahwa PSI secara konsisten memisahkan antara dua hal yang selama ini kadang menjadi kabur, antara mengurus partai dan mengurus politik. Sejak awal PSI telah memisahkan struktur

---

<sup>15</sup> Nindy Elyse Tanton, Gatut Priyowidodo, and Titi Nur Vidyarini, 'Citra Partai Solidaritas Indonesia Di Publik Milenial Surabaya', *Jurnal E-Komunikasi*, 7.2 (2019)